

## **Kontribusi PAD, Dana Perimbangan, Belanja Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Jawa Tengah**

**Ari Nurul Fatimah**

ari.nurul.fatimah@untidar.ac.id

Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia

**Nuwun Priyono**

nuwunpriyono@untidar.ac.id

Program Studi D3 Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Tidar, Kota Magelang, Indonesia

### ***Abstract***

*The system of change from centralized to decentralized puts new hope for the majority of the Indonesian people. With decentralized government management or delegating authority to local governments, government management authority will be distributed from the center to the regions. The aim of this study is to examine and prove whether the income received by the government and the balance and regional expenditure funds have an effect on the welfare of the community in regencies / cities in Central Java Province. The study uses a data panel because it will examine several objects from several specific time periods (2016-2018). The data used is the entire population of districts and cities in Central Java, namely 29 districts and 6 cities. The APBD realization report data is taken from the Directorate General of Fiscal Balance and from the Central Bureau of Statistics of the Republic of Indonesia. The hypothesis will be tested using a panel data multiple regression analysis model. The results of this study, namely PAD, DAU, and the ratio of GDP to expenditure have a positive and significant impact on the welfare of the community.*

**Keywords:** PAD, balance funds, expenditures, community welfare

### **Abstrak**

Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi menaruh harapan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan pengelolaan pemerintahan yang terdesentralisasi atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, maka kewenangan pengelolaan pemerintahan akan dapat terdistribusi dari pusat kepada daerah. Tujuan penelitian ini akan mengkaji dan membuktikan apakah pendapatan yang diterima oleh pemerintah dan dana perimbangan dan belanja daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pada Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah. Penelitian menggunakan data panel karena akan meneliti beberapa objek dari beberapa kurun waktu tertentu (2016-2018). Data yang digunakan yaitu seluruh populasi daerah di Jawa Tengah yaitu 29 kabupaten dan 6 kota. Variabel penelitian terdapat di laporan realisasi APBD diambil dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Hipotesis diuji dengan regresi linier berganda data panel. Dari hasil olah data dan analisis data, variabel PAD, DAU, dan rasio belanja PDRB menghasilkan pengaruh yang positif dan signifikan dalam kaitannya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Kata kunci:** PAD, dana perimbangan, belanja, kesejahteraan masyarakat

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah hakekatnya merupakan upaya terencana untuk menghasilkan pemerintah yang memiliki kemampuan profesional. Selain itu, pembangunan daerah juga mempunyai tujuan untuk meningkatkan kelayakan hidup dan kesejahteraan rakyat sehingga terwujudnya kemandirian daerah dan kemajuan yang merata (Aditya & Maryono, 2018). Pembangunan daerah dan kemandirian daerah mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Pembangunan daerah mempunyai standar yang berbeda-beda di masing-masing daerah. Pembangunan daerah dapat terlaksana dengan baik jika kegiatan masyarakatnya juga mendukung. Salah satu hal yang dapat meningkatkan pembangunan di daerah yaitu kemandirian daerah dalam melakukan program-program yang mendukung pencapaian daerah. Untuk menilai tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari sisi keuangan daerahnya. Keuangan yang dapat disoroti untuk menilai kemandirian daerah yaitu dari perbandingan antara pendapatan dan anggaran yang telah disusun oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah harus berusaha untuk melakukan pengaturan dalam pengelolaan dana yang ditransfer oleh pusat sehingga mengurangi ketergantungan daerah (Kustianingsih et al., 2018).

Laporan keuangan daerah merupakan bentuk dari tata kelola pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan akuntabel. Masyarakat daerah mempunyai implikasi bahwa pemerintah dapat memberikan informasi keuangan yaitu salah satunya berbentuk laporan keuangan. Adapun laporan keuangan daerah mempunyai konten yang berbeda dengan laporan keuangan perusahaan yang ada secara umum. Perusahaan biasa secara umum tujuannya memperoleh laba sedangkan pemerintah daerah, laba bukan menjadi tujuan utama dalam kegiatan operasionalnya. Laporan keuangan perusahaan disusun untuk melihat tingkat laba yang diperoleh selama transaksi di suatu periode. Laporan keuangan daerah disusun untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah pada satu daerah. Konsisi tersebut dapat diamati di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) (Suranta et al., 2018).

Kebijakan otonomi daerah sudah diimplementasikan hampir 20 tahun. Otonomi daerah sudah dimulai sejak adanya paket undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjadi aturan yang mengatur otonomi daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memasuki babak baru dalam sistem pengelolaan pemerintahan. Perjalanan implementasi sistem otonomi daerah ditandai dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal. Hal tersebut merubah sebagian besar aspek pengelolaan keuangan negara, terutama keuangan pemerintah daerah.

Perubahan sistem dari sentralisasi menjadi desentralisasi menaruh harapan baru bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Dengan pengelolaan pemerintahan yang terdesentralisasi atau melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah, maka kewenangan pengelolaan pemerintahan akan dapat terdistribusi dari pusat kepada daerah. Proses desentralisasi dapat memberi peluang bagi masyarakat di daerah untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat mencapai kesejahteraan masyarakat. Berbagai aspek pengelolaan pemerintahan yang didistribusikan termasuk aspek keuangan. Namun sistem desentralisasi yang ada memberikan dampak yang berbeda-beda di masing daerah Seperti penelitian yang dilakukan oleh Rosita & Sutrisna, (2018) bahwa hasil penelitiannya tentang pengaruh dari desentralisasi di Pulau Bali yaitu pendapatan daerah mempunyai pengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika dilihat dari sisi dana perimbangannya ternyata dapat berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Deviani, (2016) di Sumatera Barat. Hasil penelitiannya yaitu dampak dari desentralisasi mengenai kesejahteraan masyarakat dapat meningkat ketika rasio pertumbuhan belanja modal juga meningkat.

Pengelolaan keuangan yang terdesentralisi bertujuan untuk mengurangi ketimpangan keuangan secara vertikal maupun horizontal. Pengelolaan keuangan secara vertikal akan dapat mengurangi ketimpangan keuanganyang ada di pusat maupun di daerah, sedangkan pengelolaan secara horizontal akan mengurangi ketimpangan keuangan antar pemerintah daerah. Dalam rangka untuk meningkatkan kinerja, pemerintah daerah dapat meningkatkan pengelolaannya dengan pengelolalaan keuangan daerah yang diserahkan dari pusat ke daerah. Desentraliasi pemerintah daerah kabupaten dan kota memberikan gambaran pada masyarakat dalam hal kemampuan pemerintah untuk mengelola kinerja tiap daerah. Dengan melihat fenomena tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat merencanakan dan melaksanakan program sesuai dengan kondidi masyarakat di daerah masing-masing (Badjra et all., 2017).

Akun belanja di laporan realisasi anggaran menjadi komponen yang krusial dalam proses penilaian kerja pemerintah. Masyarakat membayar pajak daerah untuk kepentingan pembangunan daerah. Hasil dari pembayaran pajak tersebut, masyarakat dapat mengevaluasi penggunaan dana tersebut digunakan untuk kepentingan public dengan baik. Belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah merupakan suatu kebijakan yang mencerminkan arah pembangunan daerah. Belanja daerah perlu dievaluasi penggunaannya untuk mengetahui pertumbuhan suatu daerah tersebut (Deviani, 2016). Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dengan peran alokatif. Peran alokatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peran alokatif tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah dengan penyusunan kebijakan tertentu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung kegiatan di daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat (Deswantoro, Ismail, & Hendarmin, 2017). Penyusunan anggaran berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi. Anggaran yang dialokasikan dengan benar yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat diwujudkan salah satunya dengan pengalokasian belanja modal secara tepat sehingga kebutuhan suatu daerah dapat terpenuhi (Sita, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Rosita & Sutrisna (2018) merujuk kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di Pulau Bali. Sita (2017) melakukan penelitian mengenai desentralisasi di Pulau Kalimantan. Deviani (2016) juga melakukan penelitian tentang pengaruh keuangan ini di Sumatera Barat. Oleh karena itu, penelitian ini akan merujuk dampak desentraslisasi terhadap kesejahteraan masyarakat di Propinsi Jawa Tengah.

Secara strategis, Propinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang berada di tengah-tengah Pulau Jawa. Hal tersebut menjadikan Propinsi Jawa tengah menjadi Kawasan pusat kegiatan ekonomi antara pengemabngan Kawasan barat dan Kawasan timur. Selain itu, wilayah tersebut mempunyai jalur pelayaran nasional dan internasional sehingga memungkinkan untuk Jawa Tengah dapat memperluas jaringan perdagangan antar kota. Jawa Tengah juga memiliki potensi di sector pertanian, perkebunan, industri, dan perikanan. Potensi-potensi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang penggunaan alokasi anggaran APBN di seluruh wilayah Jawa Tengah (Badan Anggaran DPR RI, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini akan mengkaji dan membuktikan apakah pendapatan, dana perimbangan, dan belanja daerah berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat di Propinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian ditujukan kepada pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah terutama PAD dan dana perimbangan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Selain itu, pemerintah juga dapat mempertimbangkan manajemen keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan PAD, dana perimbangan, dan belanja daerah. Kemudian penelitian ini juga diharapkan sebagai referensi dan pertimbangan lebih lanjut bagi penelitian di bidang akuntansi sektor public khususnya keuangan daerah.

## KAJIAN TEORI

### **Teori Agency**

Teori agensi berusaha untuk menjelaskan hubungan antara agen dan principal dengan menggunakan mekanisme suatu kontrak. Kontrak tersebut terdiri dari pihak yang diberi tanggung jawab dan pihak yang memberi tugas. Ada dua masalah agensi yang dapat diselesaikan yaitu ketika tujuan antara agen dan principal bertentangan dan ketika masalah *risk sharing* yang terjadi pada sikap yang berbeda pada suatu resiko. Anggaran merupakan salah satu sistem perencanaan dan pengawasan jalannya operasional pemerintahan yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Teori keagenan dalam penyusunan APBD berhubungan dengan eksekutif sebagai agen dan masyarakat sebagai principal (Ratnadi, Ariyanto, & Wirawati, 2016).

Teori keagenan dapat diterapkan pada sector public yaitu melalui hubungan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari penyusunan anggaran. Pemerintah pusat menyusun anggaran yang kemudian didistribusikan ke pemerintah daerah untuk merealisasikan anggaran tersebut. Peraturan perundang-undangan dijadikan sebagai bentuk komitmen antara eksekutif, legislative, dan public pada pemerintahan. Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pihak eksekutif yaitu dengan membuat rancangan APBD yang menjadi dasar dalam pelayanan public secara umum. Kebijakan dalam membuat rancangan APBD, eksekutif dibantu oleh pihak legislative untuk didiskusikan bersama agar dapat diterapkan menjadi peraturan daerah dengan baik. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen antara legislative dan eksekutif dalam melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran. Dengan demikian, kontrak yang dilakukan tersebut dapat mendukung perspektif keagenan (Zelmiyanti, 2016)

### **Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Adanya konsep desentralisasi, mengakibatkan keuangan pusat dan daerah saling erat kaitannya. Konsep desentralisasi bermaksud untuk melakukan pembagian dana atau membelanjakan sumber dan pemerintah dari pusat ke daerah. Dana yang dibelanjakan oleh pemerintah dapat mendukung dan mendorong kegiatan pelaksanaan dari segi fungsi daerah, penyediaan dan pelaksanaan guna untuk meningkatkan pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Konsep pendanaan secara desentralisasi diperoleh dari pendapatan asli daerah. Pendanaan tersebut dilimpahkan dari pemerintah yang berada di pusat ke pemerintah di tiap daerah. Salah satu bentuk dari pembiayaan tersebut yaitu dengan pengalokasian dana yang berhubungan dengan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki. Oleh karena itu, anggaran yang diperlukan oleh pemerintah seharusnya sebanding dengan kegiatan yang dijalankan guna untuk melaksanakan program pemerintah daerah (Rusmita, 2016).

Kuangan pusat dan keuangan daerah saling berkaitan yaitu sebagai perimbangan antara keuangan yang ada di pemerintah pusat dan keuangan yang ada di pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diperhatikan karena ada beberapa isu tentang keuangan daerah. Permasalahan yang muncul yaitu daerah kurang puas pada perlakuan pemerintah pusat dalam menentukan sumber data alam yang mempunyai potensi. Kesenjangan pertumbuhan ekonomi antardaerah akan terjadi apabila permasalahan tentang keputusan pengalokasian dana yang berbeda antardaerah (Kurniati, 2013).

Menurut Hutagalung, (2016) keuangan pemerintah pusat dan daerah akan saling berhubungan, artinya bahwa keuangan pusat menjadi suatu sistem untuk mengelola sejumlah dana. Selain itu, keuangan yang akan dibagi di tingkat pemerintah dapat mendukung sumber daya yang dimiliki daerah dalam rangka mendukung seluruh kegiatannya. Konsep hubungan antara pusat dan daerah yang lain yaitu hubungan administrasi dan hubungan kewilayahan.

Konsep tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat dapat mengalokasikan dana kepada daerah dengan menyesuaikan aturan yang telah ditetapkan.

### **Keuangan daerah**

Pengertian pengelolaan keuangan daerah yaitu segala aktivitas sumber keuangan yang dimiliki oleh suatu daerah untuk dialokasikan pada setiap kegiatan. Jika dilihat dari sisi lain, pengelolaan keuangan daerah ada beberapa poin yang perlu dicermati. Aspek dalam pengelolaan sumber-sumber keuangan diharapkan mampu memberikan penerimaan yang memberikan kontribusi di setiap daerah. Contoh kegiatannya yaitu ditetapkannya Badan Eksekutif dan Badan Legislatif dari masing-masing daerah. Sumber-sumber keuangan yang akan dialokasikan ke pemerintah daerah diarahkan untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, dan didasari oleh prinsip-prinsip ekonomis yang ada secara umum (Putera, 2016).

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian kegiatan dari tahap merencanakan, mengadministrasikan, melaporkan, mempertanggungjawabkan dan mengawasi keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat memenuhi beberapa prinsip yaitu transparansi, akuntabilitas, dan *value for money*. Prinsip transparansi merupakan sikap keterbukaan yang dilakukan dalam merencanakan, menyusun, dan melaksanakan anggaran yang dilimpahkan ke daerah. Prinsip akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban public dalam proses penganggaran sampai pelaporan kepada pemerintah dan masyarakat. Sikap transparansi dan akuntabilitas mempunyai kaitan yang sangat erat dalam hal pertanggungjawaban laporan. Karena dana yang digunakan pemerintah bersumber dari masyarakat, maka masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui dan menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah (Kaunang & Naukoko, 2016)

### **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Definisi PAD menurut UU No. 33 tahun 2004 pasal 1 yaitu suatu masukan atau pendapatan yang diterima daerah yang diberikan oleh pusat. Pendapatan tersebut dilimpahkan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Pendapatan Asli daerah (PAD) juga merupakan sumber penerimaan daerah yang mendukung kinerja keuangan daerah. Untuk mencapai pembangunan dan infrastruktur daerah yang baik, PAD menjadi sumber pembiayaan keuangan daerah. Dalam masa desentralisasi, pemerintah daerah diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan PAD dalam rangka pembiayaan segala kegiatan untuk menciptakan infrastruktur yang dibutuhkan (Wandira, 2013).

Tingkat kemandirian daerah dapat ditentukan dari sikap ketergantungan suatu daerah tersebut. Salah satu upaya pemerintah daerah untuk menekan ketergantungan tersebut yaitu dengan adanya pembiayaan mandiri yang berasal dari PAD Pemerintah Daerah. Hal tersebut dapat didukung dari pendelegasian wewenang sumber pendanaan dari pusat ke daerah.

Pendapatan asli daerah mempunyai beberapa fungsi dalam pelaksanaan program pemerintah pusat yaitu sebagai sumber untuk pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah dan sebagai penekan untuk memperkecil ketergantungan dalam mendapat dana dari pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah pusat telah melimpahkan dana APBD untuk pemerintah daerah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam hal ini, suatu daerah dapat mengelola potensi yang dimiliki mulai dari alam hingga manusianya yang berguna untuk meningkatkan PAD (Sitompul, 2017). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian yaitu:

*H<sub>1</sub>: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.*

**Dana Perimbangan**

Banyak pengertian mengenai dana perimbangan, salah satunya menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004. Dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa dana perimbangan yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN. Sumber dana tersebut kemudian dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah. Kegiatan yang perlu didanai tersebut mendukung konsep desentralisasi (Prasasti, 2013). Pemberian dana perimbangan melalui APBN mempunyai tujuan untuk masing-masing daerah. Tujuan tersebut yaitu untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah. Selain itu, dana perimbangan juga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mendalami potensi ekonomi daerah (Badjra et al., 2017).

Dana perimbangan dibagi menjadi empat jenis yaitu dana bagi hasil pajak / bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan provinsi. Sering dengan berjalannya waktu, dana alokasi khusus berkembang menjadi 2 jenis yaitu dana alokasi fisik dan non fisik. Kedua jenis dana alokasi khusus tersebut bertujuan untuk mengakomodasi dana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (Setiawan, 2017). Kesenjangan dari horizontal maupun vertical dapatatasi melalui dana yang dialokasikan untuk kegiatan secara umum dan dana yang dibagi hasilnya seperti pajak. Dana alokasi khusus bertujuan untuk menjamin hal-hal yang dianggap penting pemerintah pusat. Dalam hubungan pemerintah pusat, pembagian sumber keuangan yang adil dan rasional dapat diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi yang tepat. Kebijakan tersebut mempunyai arti bahwa daerah yang mendapatkan pendapatan yang besar berarti daerah tersebut mempunyai kekayaan sumber daya alam (Badjra et al., 2017).

**Dana Bagi Hasil (DBH)**

DBH merupakan sumber dana yang dilimpahkan dari pusat ke daerah. Dana tersebut ada dua, pertama DBH pajak dan kedua DBH bukan pajak. Sumber dana untuk DBH bukan pajak yaitu dana yang diperoleh dari bagian yang berasal dari bebrapara penerimaan. Alam terutama kehutanan menjadi sumber utama dalam hasil pembiayaan menggunakan DBH. Pertambangan umum, minyak bumi, gas, dan panas bumi juga mnejadi sumber penerimaan yang dapat menghasilkan DBH. Dari sisi kelautan, perikanan tak kalah besarnya menjadi sumber penerimaan di DBH (Wandira, 2013).

Dana Bagi Hasil (DBH) dalam konteks lain yaitu pendapatan APBD yang dialokasikan kepada daerah dengan memperhatikan potensi daerah dari pemerintah pusat. Prosentase DBH yang dialokasikan untuk mendanai kebutuhan kegiatan di masing-masing daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (Harahap, 2017).

Menurut Harefa (2018), DBH digunakan untuk penyeimbang fiskal antara pusat dan daerah dari pajak dan sumber daya alam yang dibagikan termasuk sebagai pengoreksi atas eksploitasi sumber daya alam. Kekayaan sumber daya alam tiap daerah dapat menghasilkan pajak tinggi dan memiliki porsi pendapatan yang juga tinggi. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

*H<sub>2</sub>: Dana bagi hasil berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.*

**Dana Alokasi Umum (DAU)**

Pengertian dana alokasi umum (DAU) merupakan dana yang diambil atas dasar penghasilan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana tersebut secara khusus dilimpahkan dalam rangka pemerataan untuk meningkatkan kemampuan daerah. DAU dirancang untuk mengelola keuangan diantara pemerintah daerah serta mewujudkan implementasi atas kebijakan desentralisasi. Pengertian tersebut menurut Undang-undang No.33 tahun 2004 (Suryana, 2018)

Dana Alokasi Umum (DAU) terbilang komponen penting dari pendapatan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kebutuhan pemerintah daerah dapat terpenuhi dari alokasi dana umum ini sehingga pemerintah daerah mampu membiayai kegiatannya. Selain itu DAU juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan daerah untuk masyarakat (Rachmawati, 2015)

Dana Alokasi Umum merupakan bagian dari APBN yang mempunyai tujuan yaitu melakukan penyamarataan keuangan yang dilimpahkan antar daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan pengeluarannya. Kuncoro (2004) menjelaskan bahwa DAU disebut sebagai *block grant*. Arti dari block grant tersebut berarti dana diberikan kepada semua daerah untuk mengurangi kesenjangan sumber dana antara jumlah dan kebutuhan fiskal di setiap daerah. Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian yaitu:

*H<sub>3</sub>: Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.*

### **Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada pemerintah daerah dalam rangka memberikan dana kepada daerah untuk digunakan sebagai kegiatan khusus yang sudah ditetapkan di dalam APBN. Adapun aturan dari Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 40, DAK telah ditetapkan dalam tiga kriteria yaitu kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Penetapan dana alokasi khusus yang mempertimbangkan kemampuan keuangan di suatu daerah dapat dikatakan sebagai kriteria umum. Dana alokasi yang ditetapkan bertujuan untuk melakukan pengadaan barang dan fasilitas khusus dapat dimasukkan dalam katagori kriteria khusus. Kriteria khusus ini ditujukan untuk pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung amapun tidak langsung.

Pengalokasi DAK dialokasikan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan. Karena sifatnya khusus, maka dana tersebut diberikan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan priporitas daerah. Selain itu, kebijakan alokasi DAK mengutamakan daerah yang mempunyai kemampuan keuangan di bawah rata-rata. Daerah dalam pembangunan juga diprioritaskan pada saat pengalokasian DAK (Nuryadin & Suharsih, 2017).

Daerah-daerah yang dianggap di bawah rata-rata akan diberikan dana untuk menunjang kegiatan atau rencana proyek sesuai dengan usulan tiap daerah. Bentuk usulan dapat berpedoman pada kebijakan instansi terkait. Untuk membuktikan bahwa suatu daerah memang kurang mampu dalam hal pembiayaan, maka tiap daerah dapat mengusulkan kegiatan datau kebutuhan yang tidak dapat diperhitungkan (Aditya & Maryono, 2018). Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis penelitian yaitu:

*H<sub>4</sub>: Dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.*

### **Belanja Daerah**

Belanja daerah dimaknai sebagai pengeluaran pemerintah yang sifatnya mengurangi rekening kas dan mengurangi ekuitas dana. Selain itu, belanja daerah merupakan suatu kewajiban yang harus digunakan oleh pemerintah. Apabila dana belanja tidak digunakan, maka dana tersebut tidak akan kembali ke daerah (Harliza & Anitasari, 2017). Belanja daerah mempunyai fungsi untuk mengolaborasikan permintaan masyarakat dengan penyedia sarana dan prasarana. Pemerintah daerah pada umumnya tidak mampu untuk menyediakan fasilitas umum seperti perusahaan swasta. Pengeluaran pemerintah dapat terlaksana jika pemerintah telah merencanakan program yang mendukung sumber penerimaan daerah (Gorahe et al., 2012).

Belanja pemerintah memberikan dampak untuk pembangunan daerah dalam rangka kegiatan fiskal yang membutuhkan alokasi dana. Hal tersebutlah yang dapat mengukur keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya dalam hal belanja. Saat kebutuhan belanja semakin meningkat, secara tidak langsung pelayanan akan menjadi lebih baik dan dapat meningkatkan kesejahteraan. Aktivitas belanja di pemerintah daerah, dalam laporan APBD termasuk kegiatan yang sering dilakukan dengan mengeluarkan kas daerah dalam hal kegiatan operasional (Krismajay & Dewi, 2019).

Namun, semakin banyaknya kegiatan pemerintah daerah yang dilaksanakan, hal tersebut akan berdampak pada pembiayaan yang semakin besar pula. Pembiayaan tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan administrasi pemerintahan dan kegiatan pembangunan. Dalam hal ini berarti semakin meningkat anggaran pengeluaran pemerintah akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut akan mengakibatkan kesenjangan ekonomi dan kesenjangan kesejahteraan jika tidak didukung dengan kesempatan yang tepat dalam penggunaan sumber keuangan (Deswanto et al., 2017). Belanja daerah dalam penelitian ini dilihat dari perbandingan belanja modal, perbandingan belanja PDRB, dan perbandingan pertumbuhan belanja modal.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis yang diajukan yaitu:

*H<sub>5</sub>: Rasio belanja modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.*

*H<sub>6</sub>: Rasio belanja PDRB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.*

*H<sub>7</sub>: Rasio pertumbuhan belanja modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.*

### **Tingkat Kesejahteraan Masyarakat**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. IPM mempunyai arti yaitu suatu indeks gabungan dari tiga kebutuhan dasar yaitu indikator kesehatan, indikator pendidikan, dan indikator ekonomi (Sita, 2017). Indikator-indikator tersebut menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan tingkat kepuasannya. IPM dapat menangkap perkembangan di sektor ekonomi dan sosial. Indeks tersebut merupakan ukuran yang menjelaskan berbagai indikator dan agregat pembangunan manusia. Indeks tersebut menentukan tingkat kesejahteraan individu yang nantinya akan menentukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya (Rasbin, 2012).

*United Nations for Development Program (UNDP)* mengartikan bahwa pembangunan manusia sebagai sebuah proses memperluas pilihan masyarakat. Sumber daya manusia adalah hal penting dalam peningkatan pembangunan. Indikator IPM menurut UNDP nilainya antara 0 hingga 100. Jika nilai IPM semakin tinggi mendekati 100 berarti nilai pembangunan manusia semakin baik. Indikator nilai IPM terdiri dari tiga kelompok yaitu IPM kurang dari 50 digolongkan rendah, IPM yang kurang dari atau sama dengan 50 dan tidak lebih dari atau sama dengan 80 digolongkan sedang/menengah, dan IPM yang lebih dari atau sama dengan 80 digolongkan tinggi (Aditia & Dewi, 2015).

### **Penelitian Terdahulu**

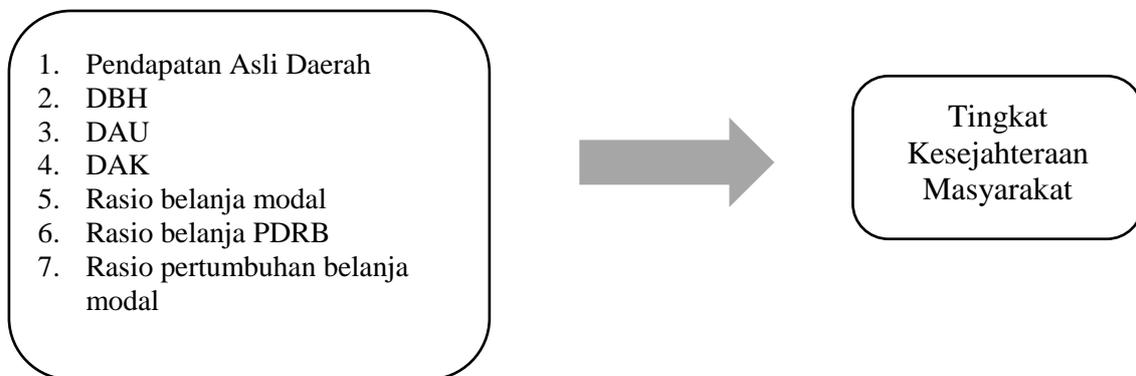
1. Penelitian (Sitompul, 2017) menghasilkan data bahwa pendapatan asli daerah menjadikan modal dasar pemerintah untuk memperkecil ketergantungan dalam perolehan dana dari pemerintah pusat. PAD diharapkan dapat memberi kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi PAD, kegiatan yang dilaksanakan oleh

daerah memberikan dampak bagi pembangunan sehingga kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Rosita & Sutrisna, 2018) tentang laporan keuangan daerah di Propinsi Bali menunjukkan komponen pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pendukung yang kuat dalam kesejahteraan masyarakat. Komponen dana perimbangan berpengaruh dalam hal pembiayaan kegiatan pemerintah daerah, namun hal tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk mendorong masyarakat yang sejahtera di kabupaten/kota Propinsi Bali.
3. (Sita, 2017) melakukan penelitian tentang Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat di Pulau Kalimantan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut berarti meningkatnya belanja modal akan memberi dampak positif yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.
4. Penelitian (Deviani, 2016) tentang Analisis Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pendidikan (Studi Empiris Kota dan Kabupaten di Sumatera Barat) menunjukkan bahwa hasil uji hipotesis terhadap perbandingan pertumbuhan belanja modal mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut juga akan mengakibatkan kesejahteraan masyarakat meningkat.

### **Kerangka Berpikir**

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang adanya kontribusi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja daerah memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Berikut tabel kerangka berpikirnya



**Gambar 1.** Kerangka berpikir penelitian

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian dan Populasi**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan data sekunder. Jenis data penelitian ini yaitu data panel (*pooled data*). Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Penelitian ini mengamati beberapa objek dan dalam beberapa periode waktu yaitu dari tahun 2016-2018. Penelitian menggunakan data populasi se-kabupaten/kota Jawa Tengah.

**Sumber Data**

Melihat dari variabel penelitian, sumber data ada pada laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Peneliti mengambil laporan tersebut dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (DJPK). Komponen yang akan digunakan dalam laporan tersebut yaitu PAD, Dana Bagi Hasil (DBH), DAU, DAK, rasio belanja daerah, dan rasio belanja modal. Kemudian data mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Produk Domestik Bruto (PDRB) yang berasal dari Badan Pusat Statistik dan Bappenas. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bersumber dari BPS Propinsi Jawa Tengah. Selain itu data lain bersumber dari *website* DJPK dan BPS yang diakses pada tanggal 3 April 2020.

**Variabel Operasional dan Pengukuran Variabel**

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat. Tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator IPM menurut UNDP berkisar antara 0 hingga 100. Jika nilai IPM semakin tinggi mendekati 100 berarti nilai pembangunan manusia semakin baik. Indikator nilai IPM dibagi menjadi tiga kelompok yaitu IPM yang kurang dari atau sama dengan 50 dan tidak lebih dari atau sama dengan 80 digolongkan sedang/menengah, dan IPM yang lebih dari atau sama dengan 80 digolongkan tinggi. Variabel independent yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Dana Bagi Hasil
3. Dana Alokasi Umum
4. Dana Alokasi Khusus
5. Rasio Belanja Modal
6. Rasio Belanja PDRB
7. Rasio pertumbuhan belanja modal.

Variabel independen tersebut berupa nominal dari masing-masing variabel.

**Pengujian Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi berganda data panel. Tujuan dari pengujian hipotesis yaitu untuk melihat seberapa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Teknik pengujian hipotesis menggunakan metode kuadrat terkecil/ *ordinary least squares*. Berikut persamaan regresinya:

$$TKM_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + \beta_6 X_{6i} + \beta_7 X_{7i} + e_i$$

Keterangan :

TKM= Tingkat Kesejahteraan Masyarakat,

$\alpha$  = Konstanta,

$\beta$  = Slope atau koefisien regresi atau intersep,

$X_1$  = PAD,

$X_2$  = Dana bagi hasil (DBH),

$X_3$  = Dana Alokasi Umum (DAU),

$X_4$  = Dana Alokasi Khusus (DAK),

$X_5$  = rasio belanja daerah,

$X_6$  = rasio belanja terhadap PDRB,

$X_7$  = rasio pertumbuhan belanja modal

$e$  = error.

**Pengukuran variabel**

$$\text{Rasio belanja modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}}$$

$$\text{Rasio belanja daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Total Realisasi belanja daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio pertumbuhan belanja modal} \\ = \frac{\text{Realisasi belanja modal th t} - \text{Realisasi Belanja Modal th t} - 1}{\text{Realisasi belanja modal th t} - 1} \end{aligned}$$

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Statistik Deskriptif**

Hasil statistik deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data dari nilai rata-rata dan standar deviasi. Berikut merupakan hasil olah data dan interpretasi tentang deskriptif statistik.

**Tabel 1. Descriptive Statistic**

Item	Rata-rata	Deviasi standar	N
IPM	71,22	4,477	101
PAD	308.684.778.571,03	227.099.202.123,943	101
DBH	118.904.109.559,09	602.633.957.272,809	101
DAU	958.467.324.508,22	298.191.529.858,432	101
DAK	277.346.533.662,64	171.525.984.863,033	101
Rasio Belanja Modal	0,17	0,05707	101
Rasio Belanja PDRB	0,1088	0,04134	101
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	0,2151	0,81749	101

Berdasarkan tabel di atas N menyatakan jumlah data yang valid. Valid artinya data yang ada atau terisi. Dalam data tersebut jumlah data yang valid sebanyak 101. Mean menyatakan nilai rata-rata dari sebuah data. Tabel tersebut menunjukkan bahwa variabel PAD di Propinsi Jawa Tengah mempunyai rata-rata sebesar Rp 308.684.778.571,0396. Nilai standar deviation PAD sebesar 227.099.202.123,94366 berarti besar peningkatan maksimum rata-rata variabel PAD yaitu + Rp 227.099.202.123,94 sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel PAD sebesar – Rp 227.099.202.123,94.

Variabel DBH yang dialokasikan ke masing-masing daerah mempunyai rata-rata sebesar Rp 118.904.109.559,0990. Nilai standar deviation DBH sebesar Rp 602.633.957.272,80 berarti besar peningkatan maksimum rata-rata variabel DBH yaitu + Rp 602.633.957.272,80 sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel DBH sebesar – Rp 602.633.957.272,80. Variabel DAU yang dialokasikan di daerah Propinsi Jawa Tengah mempunyai nilai rata-rata sebesar Rp 958.467.324.508,2278. Nilai standar deviation DAU sebesar Rp 298.191.529.858,43 berarti besar peningkatan maksimum rata-rata variabel DAU yaitu + Rp 298.191.529.858,43 sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel DAU sebesar – Rp 298.191.529.858,43. Nilai rata-rata DAK yang dialokasikan untuk kegiatan khusus sebesar Rp 277.346.533.662,6436. Nilai standar *deviation* DAK sebesar Rp 171.525.984.863,03 berarti besar peningkatan maksimum rata-rata variabel DAK yaitu + Rp

171.525.984.863,03 sedangkan penurunan maksimum dari rata-rata variabel DAK sebesar – Rp 171.525.984.863,03.

Nilai rata-rata rasio belanja modal sebesar 17%. Nilai standar deviation rasio belanja modal sebesar 5,07% berarti besar peningkatan maksimum yaitu + 5,07% dan minimum penurunan variabel sebesar – 5,07%. Untuk nilai rata-rata rasio belanja terhadap PDRB sebesar 10,88%. Nilai standar deviation rasio belanja terhadap PDRB sebesar 41,34% berarti besar peningkatan maksimum yaitu + 41,34% dan minimum penurunan variabel sebesar – 10,88%. Nilai rata-rata rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 21,51% dan nilai *standar deviation* rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 81,74% berarti besar peningkatan maksimum yaitu + 81,74% dan minimum penurunan variabel sebesar – 81,74%.

### **Uji Statistik t**

Penginterpretasian hasil uji statistik t menunjukkan koefisien parameter variable independent. Variable dikatakan signifikan terhadap variable dependen jika nilai signifikansi di bawah 0,05. Dari table di atas menunjukkan bahwa variabel PAD, DAU, dan Rasio Belanja terhadap PDRB signifikan terhadap variable tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut terjadi karena nilai variable PAD yaitu 0,000; nilai variable DAU yaitu 0,000; dan nilai rasio belanja terhadap PDRB yaitu 0,004. Ketiga nilai variable tersebut berada di bawah 0,05. Variable DBH, DAK, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan belanja modal berada jauh di atas 0,05. Nilai DBH sebesar 0,250; nilai DAK sebesar 0,826; nilai rasio belanja modal yaitu 0,682; dan nilai rasio pertumbuhan belanja modal sebesar 0,526. Oleh karena itu, variable DBH, DAK, rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan belanja modal tidak signifikan terhadap variable tingkat kesejahteraan masyarakat.

### **Uji Signifikansi Simultan F (Uji Statistik F)**

Gambaran variable independent yang dimasukkan dalam penelitian secara bersama-sama dapat diuji dengan Uji F yang nantinya akan berpengaruh atau hanya secara simultan terhadap variable dependen. Uji F tersebut dapat dikatakan sebagai pengujian signifikansi keseluruhan terhadap garis regresi. Variable dependen diuji secara linier apakah ada hubungan dengan variable independent atau tidak.

Tabel ANOVA hasil dari Uji F menunjukkan nilai F hitung 15,514 yang didukung oleh nilai probabilitas 0,000. Hasil dari uji F menyatakan probabilitas nilainya lebih kecil dari 0,05, kesimpulannya koefisien regresi variable independent tidak sama dengan nol. Hal tersebut membuktikan bahwa variable independent perbandingan pertumbuhan belanja modal, DBH, PAD, Rasio Belanja Modal, perbandingan Belanja terhadap PDRB, DAU, DAK secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat..

### **Koefisien Determinasi (R Square)**

Dalam penelitian ini, R square mempunyai nilai 0,539. Nilai tersebut menunjukkan yang variabel independent dapat dijadikan informasi bagi variable dependen. Data tersebut menunjukkan 5,3% variasi tingkat kesejahteraan masyarakat dijelaskan oleh variable perbandingan pertumbuhan belanja modal, DBH, PAD, perbandingan Belanja Modal, Rasio Belanja terhadap PDRB, DAU, DAK. Sisanya 94,7% dijelaskan oleh model lain. *Standard error of estimate* (SEE) nilainya 3,15336. Nilai SEE yang mengecil, maka ketepatan model regresi dalam memprediksi variable dependen semakin tinggi.

## **Pembahasan**

Pendapatan yang diperoleh daerah dari PAD memberikan pengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hal tersebut selaras dengan penelitian (Sitompul, 2017) yang menjelaskan bahwa semakin besar kontribusi PAD maka pendapatan tersebut dapat memperlancar pembangunan dengan melaksanakan kegiatan pemerintah daerah. Pembangunan yang lancar maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima daerah selama tiga tahun berturut-turut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Propinsi Jawa Tengah. Pendapatan yang diterima masing-masing daerah tentu saja berbeda jumlahnya tergantung dari usulan kegiatannya. Dalam kondisi keuangan yang ada di daerah Jawa Tengah, kegiatan atau program yang dilakukan tiap-tiap daerah telah mendukung dalam peningkatan infrastruktur pembangunan daerah. Pendapatan daerah di Propinsi Jawa Tengah selama tiga tahun berturut-turut ternyata dapat menurunkan ketergantungan masyarakatnya sehingga kesejahteraan dapat meningkat.

Dana perimbangan terbagi menjadi DBH, DAU, dan DAK. Dalam penelitian (Rosita & Sutrisna, 2018), menunjukkan hasil penelitiannya dana perimbangan mendorong kuat kesejahteraan masyarakat. Namun dalam penelitian ini mempunyai hasil yang berbeda. Hasil dari penelitian ini, ketiga variabel tersebut ternyata tidak semuanya berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hasil variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel DBH dan DAK tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut dapat terjadi karena DAU merupakan dana limpahan pemerintah pusat untuk pemenuhan kebutuhan di daerah yang digunakan untuk tujuan desentralisasi. DAU dinilai lebih mencerminkan adanya kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan DAK dan DBH yang hanya digunakan untuk kegiatan tertentu saja. Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya, Dana Alokasi Umum ini hanya untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah saja. Dengan penjelasan tersebut, berarti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sudah tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun untuk kasus DAK dan DBH lain hasilnya. Dana yang disalurkan digunakan untuk kegiatan tertentu sesuai dengan kebijakan pemerintah dan tergantung prioritasnya. Dari hasil penelitian yang menyebutkan bahwa DAK tidak mempunyai nilai yang signifikan berarti kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah daerah belum menunjukkan hasil yang maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Begitu pula dengan hasil olah data tentang DBH. DBH akan diakokasi oleh pemerintah daerah sebagai pendukung kegiatan yang berkaitan dengan pajak daerah. Penyeimbangan pajak dapat dihubungkan dengan sumber daya alam di daerah masing-masing. Jika belum maksimal terjadi, kesejahteraan masyarakat belum meningkat dengan efektif.

Pengaruh belanja terhadap kesejahteraan dalam penelitian ini diwujudkan pada perbandingan belanja modal, belanja PDRB, pertumbuhan belanja modal. Dari ketiga variabel tersebut, ternyata hanya rasio belanja PDRB saja yang menghasilkan pengaruh signifikansi yang baik terhadap kesejahteraan masyarakat. Variabel rasio belanja modal dan rasio pertumbuhan belanja modal tidak mampu menguatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh (Deviani, 2016). Berdasarkan hasil tersebut, pemerintah dalam membelanjakan anggaran belum menghasilkan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. belanja yang dikhususkan untuk pendapatan domestik bruto lah yang memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu menjabarkan dari kajian Pustaka hingga analisis olah data. Penelitian ini dilakukan untuk memprediksi kontribusi ketiga variabel tersebut pada kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Uji dari hipotesis hasilnya menunjukkan bahwa

kontribusi PAD, DAU, dan rasio belanja PDRB dapat mendukung adanya kesejahteraan masyarakat di Jawa Tengah. Hal tersebut telah mendukung sumber penelitian terdahulu yang sesuai dengan variabel yang ada. Implikasi dari penelitian dapat digunakan oleh pihak-pihak tertentu terutama untuk pemerintah pusat maupun daerah. Hasil dari analisis data di atas menjadi salah satu informasi untuk mengevaluasi atau pengambilan keputusan oleh pemerintah tentang pengalokasian dana di daerah Propinsi Jawa Tengah. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu masyarakat untuk memantau keuangan daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran yang ditujukan kepada penelitian selanjutnya. Saran diberikan berdasarkan penelitian ini yang mempunyai beberapa keterbatasan yaitu penelitian hanya dilakukan pada tahun 2016-2018 dan dilakukan di satu propinsi saja. Sebaiknya dipenelitian yang akan datang menggunakan data dengan kurun waktu yang lebih panjang, bisa lima tahun atau sepuluh tahun, sehingga hasil analisis data akan lebih akurat dan tepat. Selain kurun waktu yang lebih panjang, penelitian selanjutnya bisa dilakukan di tempat lain dan menambahkan objek penelitiannya. Hal tersebut dapat memperluas hasil penelitian terkait laporan keuangan di daerah-daerah. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah mampu meningkatkan kekuatan dari tiap daerah dan sumber daya agar dikembangkan untuk mendapatkan besarnya pendapatan asli daerah. Penelitian selanjutnya, data yang digunakan bisa mengeksplorasi kontribusi komponen – komponen yang ada di laporan keuangan daerah untuk mendukung beberapa penelitian yang sudah ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditia, N. M. A., & Dewi, N. P. M. (2015). Pengaruh pengeluaran pemerintah di bidang Ngakan Made Agung Aditia, 1 Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan bahwa dibentuknya Pemerintah Negara Ind. *E-Jurnal EP Unuud*, 7, 7(2), 212–242.
- Aditya, D. M. E., & Maryono. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah , dana alokasi umum , dana alokasi khusus , dana bagi hasil terhadap belanja modal ( Studi pada provinsi / wilayah Kalimantan dan Sulawesi ). *Prosiding SENDI*, (33), 978–979.
- Arini Sita, P. R. (2017). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Pulau Kalimantan. *085228282256*, 2(2), 180–198. <https://doi.org/10.26486/jramb.v2i2.284>
- Badan Anggaran DPR RI. (2017). Laporan kunjungan kerja badan anggaran DPR-RI Ke Provinsi Jawa Tengah.
- Badjra, I. B., Mustanda, I. K., & Abundanti, N. (2017). Kontribusi pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap belanja modal dan kinerja keuangan daerah Provinsi Bali. *Jurnal Akuntansi Indonesia*.
- Deswanto, D. B., Ismail, A., & Hendarmin, H. (2017). Pengaruh belanja daerah berdasarkan klasifikasi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010 - 2015. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 6(3), 187. <https://doi.org/10.26418/jebik.v6i3.23256>
- Deviani. (2016). Analisis belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dan pendidikan (Studi empiris kota dan kabupaten di Sumatera Barat). *Pekbis Jurnal*, 8(1), 1–13.
- Gorahe Irdha Anisya Marsudi, Masinambow Vecky, E. D. (2012). Analisis belanja daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya di provinsi Sulawesi Utara. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi Manado*, 1–12.

- Harahap, R. U. (2017). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil terhadap indeks pembangunan manusia pada kab./kota Propinsi Sumatera Utara. *KITABAH*, 1(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Harefa, M. (2018). Hubungan dana bagi hasil dengan penerimaan daerah dan kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur. *Pajak Daerah*, 9(2), 147–160.
- Harliza, T., & Anitasari, M. (2017). Analisis belanja daerah kabupaten/kota di Bengkulu. *Ekombis Review*, 5(2), 133–140.
- Hutagalung, E. (2016). Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 42(1), 1. <https://doi.org/10.33701/jipwp.v42i1.137>
- Kaunang, C. E., & Naukoko, A. T. (2016). Analisis kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah di era otonomi daerah: Studi Pada Kota Manado (Tahun 2010-2014). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(2), 355–365.
- Krismajay, I. P., & Dewi, N. P. M. D. (2019). Pengaruh belanja daerah dan investasi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unuud*, 8, 8(6), 1390–1422.
- Kurniati, P. S. (2013). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia pada era reformasi. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 3(1), 1–12.
- Kustianingsih, N., & Muslimin dan Abdul Kahar. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah ( PAD ), dana alokasi umum ( DAU ), dana alokasi khusus ( DAK ) daerah kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Tengah. *Katalogis*, 6(6), 82–91.
- Nuryadin, D., & Suharsih, S. (2017). Analisis dan evaluasi dampak dana alokasi khusus terhadap indikator kinerja pembangunan di daerah studi kasus kabupaten-kota 2003-2013. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 18(1). <https://doi.org/10.18196/jesp.18.1.3954>
- Prasasti, S. E. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pemerintah daerah kabupaten/kota DIY tahun 2017-2013). *Universitas PGRI Yogyakarta*, 1–13.
- Putera, R. E. (2016). Pengelolaan keuangan daerah yang transparan di kabupaten tanah datar dalam melaksanakan desentralisasi fiskal. *Sosiohumaniora*, 18(3), 261–269. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v18i3.6075>
- Rachmawati, M. (2015). Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah terhadap alokasi belanja modal (Studi kasus pada kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat).
- Rasbin. (2012). Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat di tujuh Provinsi Pemekaran di Indonesia. *Kajian*, 17(4), 491–513.
- Ratnadi, N. M. D., Ariyanto, D., & Wirawati, N. G. P. (2016). Analisis pengaruh belanja langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Provinsi Bali, 11(1), 1–13.
- Rosita, I. A., & Sutrisna, I. K. (2018). Pengaruh. pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan. masyarakat pada kabupaten/kota di provinsi. *E-Jurnal EP Unud*, 7(7), 1445–1471.
- Rusmita, S. (2016). Pengaruh dana alokasi umum (DAU) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja daerah di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 5(3), 237. <https://doi.org/10.26418/jebik.v5i3.19083>
- Setiawan, M. I. (2017). Implementasi dana aspirasi di Indonesia *Abstrak/Abstrac. Defis*, 1(1), 33–47. Retrieved from <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>
- Sitompul, M. A. L. (2017). Analisis Sumber-sumber pendapatan asli daerah sebagai modal pembangunan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 1(1), 1–10. Retrieved from <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/547>

- Suranta, S., Bandi, Syafiqurrahman, M., & Perdana, H. D. (2018). Pendapatan asli daerah , dana perimbangan , otonomi fiskal dan kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi pada Propinsi Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 144–154.  
<https://doi.org/10.24964/ja.v6i2.671>
- Suryana. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) terhadap belanja modal. *Jurnal Ilmu Manajemen & Bisnis*, 9(2), 67–74.
- Wandira, A. G. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pengalokasian belanja modal. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).  
<https://doi.org/10.15294/aaj.v2i1.1158>
- Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan teori keagenan pada kinerja keuangan daerah dan belanja modal (Studi pada Provinsi di Indonesia). *Jrak*, 7(1), 11–21.

**Lampiran**  
**Uji Asumsi Klasik**

**Tabel 2. Uji Heterokedasitas**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	80,550	2,070		38,908	,000
PAD	1,011E-011	,000	,513	6,021	,000
DBH	-1,106E-012	,000	-,149	-1,156	,250
DAU	-9,317E-012	,000	-,620	-5,844	,000
DAK	-7,121E-013	,000	-,027	-,221	,826
Rasio Belanja Modal	-2,493	6,072	-,032	-,411	,682
Rasio Belanja terhadap PDRB	-25,706	8,756	-,237	-2,936	,004
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	,271	,426	,049	,636	,526

**Uji Heterokedasitas**

Uji heterokedasitas adalah bagian dari uji asumsi klasik. Fungsinya untuk mengamati model regresi ber-*variance* dari pengamatan yang berbeda (Ghozali, 2006).

Berdasarkan tabel 2 di atas, koefisien parameter untuk variable independent DBH, DAK, rasio belanja modal, dan rasio pertumbuhan belanja modal nilainya 0,01 yang berarti tidak ada heteroskedastisitas karena nilai tersebut tidak signifikan. Variable PAD, DAU, dan rasio belanja terhadap PDRB setelah diolah berada pada nilai 0,01 yang berarti data penelitian mengandung heteroskedastisitas.

**Tabel 3. Uji Parameter Individual (Uji Statistik t)**

Model	Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	80,550	2,070		38,908	,000
PAD	1,011E-011	,000	,513	6,021	,000
DBH	-1,106E-012	,000	-,149	-1,156	,250
DAU	-9,317E-012	,000	-,620	-5,844	,000
DAK	-7,121E-013	,000	-,027	-,221	,826
Rasio Belanja Modal	-2,493	6,072	-,032	-,411	,682
Rasio Belanja terhadap PDRB	-25,706	8,756	-,237	-2,936	,004
Rasio Pertumbuhan Belanja Modal	,271	,426	,049	,636	,526

**Tabel 4. Tabel ANOVA<sup>a</sup>**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1079,836	7	154,262	15,514	,000 <sup>b</sup>
Redisual	924,765	93	9,944		
Total	2004,600	100			

**Tabel 5. Hasil Koefisien determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistic				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig.
1	0,734	0,539	0,504	3,15336	0,539	15,514	7	93	0,000